



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj-IP)**

**KECAMATAN BIATAN
KABUPATEN BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Sub bagian penyusunan program keuangan dan aset Kecamatan Biatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Biatan Tahun 2022 telah dapat disusun sesuai dengan rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKj-IP, setelah pelaksanaan program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2022. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKj-IP ini dapat memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan Kecamatan Biatan serta dapat diketahui apakah program atau kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi organisasi Kecamatan Biatan.

Selain itu, dokumen LKj-IP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), serta Rencana Kerja Anggaran dan Realisasi Anggaran, sehingga dokumen LKj-IP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja satuan kerja perangkat daerah dan konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di masing-masing Bagian sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Biatan.

Demikian, semoga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Biatan Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Biatan, 31 Januari 2023

Camat,



ALL SYAHBANA, M.Pd

Pembina (IV/a)

NIP 19671227 199903 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (result oriented government), perlu adanya sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas tersebut, perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) yang merupakan bahan utama untuk monitoring dan evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan Tahun Anggaran 2022, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah termasuk Kecamatan Biatan Kabupaten Berau, wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP), selain itu informasi dalam dokumen LKj-IP merupakan bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

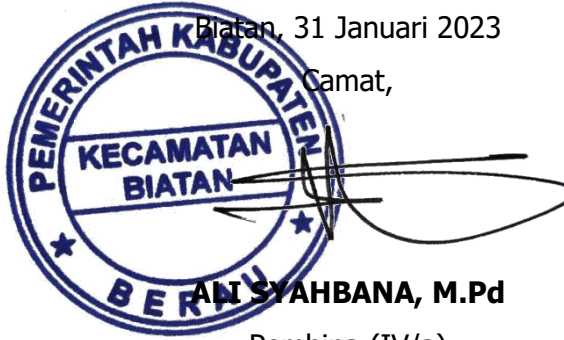
Berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Batu Putih dan Kecamatan Biatan. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau. Peraturan Bupati Berau Nomor 80 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau.

Kecamatan Biatan dipimpin oleh Camat, terdiri 1(satu) Sekretaris Kecamatan, 2(dua) Kepala Sub Bagian, dan 5(lima) Kepala Seksi, jumlah pegawai secara keseluruhan adalah 24(dua puluh empat) orang yang terdiri dari 15(lima belas) orang PNS dan 9(sembilan) orang Non PNS. Kecamatan Biatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan terhadap kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan. Visi Kecamatan Biatan mengacu kepada Visi RPJMD Kabupaten Berau sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Kecamatan Biatan 2016-2021 adalah "MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN". Untuk mewujudkan visi tersebut, pada tahun 2022 Kecamatan Biatan melaksanakan 5(lima) program dengan 11(sebelas) kegiatan dan 25(dua puluh lima) sub kegiatan dengan jumlah pagu anggaran yang ada di DPA/DPPA sebesar Rp. 4.535.126.945,00 (empat milyar lima ratus tiga puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 4.033.455.145,00 (empat milyar tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.277.922.329,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dan Belanja Barang dan Jasa Rp. 1.755.532.816,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus enam belas rupiah) serta Belanja Modal sebesar Rp. 501.671.800,00 (lima ratus satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. Rp. 501.671.800,00 (lima ratus satu juta enam ratus

tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dari seluruh program dan kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 untuk mencapai sasaran, atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assessment) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022, hal ini menunjukkan bahwa realisasi fisik dan keuangan dari sasaran program dan kegiatan yang dicapai sebesar Rp. 4.153.957.694,00 (empat milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) atau 91,61%, dari target yang ditetapkan sebesar 94,00% atau Rp. 4.263.019.328,00 (empat milyar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) kategori sangat baik.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja Kecamatan Biatan maka telah dilakukan rapat-rapat koordinasi dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan target dan realisasi kinerja semua Subbag. dan Kasi. Sedangkan upaya yang dilakukan agar kinerja Kecamatan Biatan lebih baik dan akuntabel antara lain melakukan reviu terhadap program atau kegiatan yang kurang tepat sasaran, meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, melakukan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, terutama dengan membuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Renstra, serta memanfaatkan secara nyata hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan.

Biatan, 31 Januari 2023
Camat,

ANI SYAHBANA, M.Pd
Pembina (IV/a)
NIP 19671227 199903 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah	4
1.4. Sumber Daya Manusia	10
1.5. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA.....	14
2.1. Rencana Stragis	14
2.1.1. Visi dan Misi.....	14
2.1.2. Tujuan dan Sasaran.....	16
2.1.3. Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program.....	17
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	20
2.4. Perjanjian Kinerja (PK).....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	28
3.2. Capaian Kinerja Perangkat Daerah	29
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kineja	30
3.3.1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.....	31
3.3.2. Membandingkan antara realisasi dan kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	31
3.3.3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	34
3.3.4. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	37
3.3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	38
3.3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja	38
3.4. Realisasi Anggaran	39
BAB IV PENUTUP	44
Daftar Lampiran.....	46
5.1. Perjanjian Kinerja	

5.2. Rencana Kinerja Tahunan.....

5.3. Pengukuran Kinerja Tahunan.....

5.4. Matrik Rencana Strategis.....

5.5. Indikator Kinerja Utama

5.6. Cascading

5.7. Rencana Aksi

5.8. Rangkaian Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

5.9. Lain-lain yang dianggap perlu.....

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem laporan kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP). Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan/atau unit yang ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun Anggaran 2022, pemerintah daerah menyusun LKj-IP 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKj-IP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKj-IP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Matrik Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi

Tujuan penyusunan LKj-IP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (Kecamatan Biatan) dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKj-IP ini dapat digunakan sebagai :

- Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Biatan dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
- Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Biatan;
- Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Biatan pada tahun berikutnya;
- Sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Peraturan perundang-undangan yang diacu dalam penyusunan dokumen LKj-IP Kecamatan Biatan antara lain :

- Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2006 tentang RPJP Kabupaten Berau 2006-2026;
- Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2004 Tentang RTRW Kabupaten Berau;
- Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.1.1. Kondisi Geografis

Kecamatan Biatan adalah sebuah Kecamatan termuda dari 13 Kecamatan lainnya diwilayah Kabupaten Berau, merupakan pemekaran eks wilayah Kecamatan Talisayan, dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 15 Pebruari 2005. Adapun batas administrasi Kecamatan Biatan sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Tabalar dan Laut Sulawesi
- Timur : Kecamatan Talisayan
- Selatan : Kabupaten Kutai Timur
- Barat : Kecamatan Tabalar dan Kabupaten Kutai Timur

Kecamatan Biatan mempunyai ibu kota Kampung Biatan Lempake yang berjarak \pm 130 km dari ibu kota Kabupaten Berau yaitu Kecamatan Tanjung Redeb. Adapun secara administrasi Kecamatan Biatan terbagi dalam 8 (delapan) kampung yang terdiri dari :

- Biatan Lempake
- Biatan Ulu
- Biatan Bapinang
- Biatan Baru
- Biatan Ilir
- Karangan
- Manunggal Jaya
- Bukit Makmur Jaya

1.1.2. Kondisi Demografis

Kecamatan Biatan memiliki jumlah penduduk 7.092 jiwa yang terbagi dalam laki-laki 3.773 jiwa dan perempuan 3.319 jiwa, sedangkan untuk persebaran/kepadatan penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Nama Kampung	Jumlah Jiwa		Jumlah(L+P)
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Biatan Lempake	1085	926	2011
2.	Biatan Ulu	119	95	214
3.	Biatan Bapinang	378	318	696
4.	Biatan Baru	319	310	629
5.	Biatan Ilir	516	416	932

No	Nama Kampung	Jumlah Jiwa		Jumlah(L+P)
		Laki-Laki	Perempuan	
6.	Karangan	297	257	554
7.	Manunggal Jaya	635	620	1255
8.	Bukit Makmur Jaya	424	377	801
	Jumlah	3773	3319	7092

Sumber Data : Laporan Bulanan Kampung di Kecamatan Biatan

1.1.3. Dasar Hukum Pembentukan Kecamatan Biatan

Kecamatan Biatan merupakan organisasi perangkat daerah Kabupaten Berau yang memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang terdiri dari otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Berau, adapun pelaksanaan tugas urusan pemerintahan yang dilaksanakan yaitu tugas atributif dan tugas delegatif.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sedangkan tugas dan fungsi Kecamatan Biatan (sesuai Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Biatan Kabupaten Berau), adalah membantu bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di Kecamatan, Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kampung dan kelurahan, Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kecamatan mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan;
- Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan kelurahan;

- Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kampung dan kelurahan;
- Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengantugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

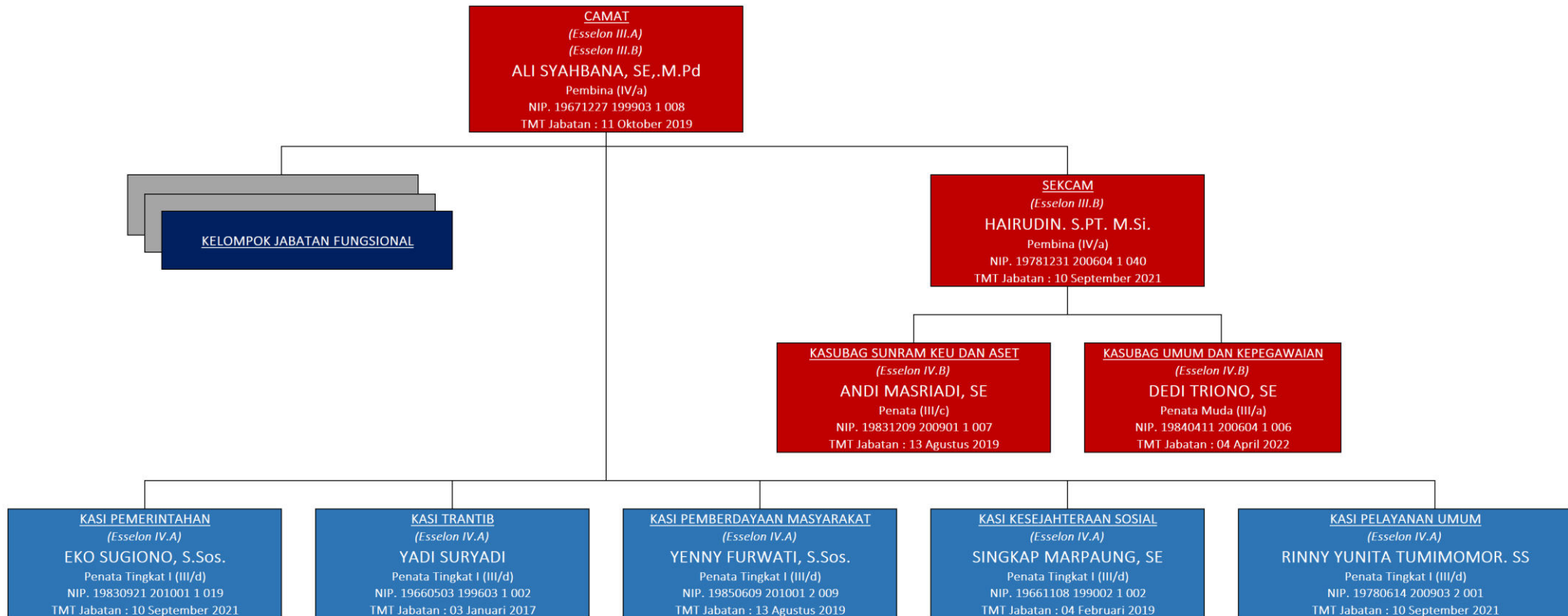
Struktur Organisasi dan Perangkat Daerah Kecamatan Biatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Berau terdiri dari :

- Camat;
- Sekretaris dibantu para :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Sub Bagian Penyusunan Program Keuangan dan aset;
- Seksi Pemerintahan;
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- Seksi Pelayanan Umum;
- Seksi Kesejahteraan Sosial;
- Kelompok Jabatan Fungsional;

Susunan organisasi dan Tata kerja Perangkat daerah Kecamatan dan Kelurahan berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 80 Tahun 2016. Adapun susunan organisasi Kecamatan Biatan sebagai mana tergambar seperti di bawah ini :

Gambar 1.3.1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR CAMAT BIATAN
KABUPATEN BERAU



Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Biatan

Tabel 1.3.2
 DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK) KECAMATAN BIATAN
 PER JANUARI 2023

NO.	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR			NIP	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA		LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN TERAKHIR		JENIS KELAMIN	AGAMA
					GOL	TMT	ESE LON	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	THN	NAMA JURUSAN	THN LULUS		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ALI SYAHBANA, SE.,M.Pd	Marancang Ulu	27/12/67	19671227 199903 1 008	IV/a	01/10/19	III/a	CAMAT	10/09/21	22	02	PIM IV	2000	S.2 Manajemen Pendidikan	2012	L	ISLAM
2	HAIRUDIN. S.PT. M.Si.	Lombok Timur	21/12/78	19781231 200604 1 040	IV/a	01/10/22	III/b	SEKRETARIS	10/09/21	16	09	PIM IV	2017	S.2 Mangister Sains	2014	L	ISLAM
3	SINGKAP MARPAUNG, SE	Asahan	08/11/66	19661108 199002 1 002	III/d	01/04/18	IV/a	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL	04/02/19	23	02	-	-	S.1 Ekonomi	2011	L	ISLAM
4	YADI SURYADI	Cianjur	03/05/66	19660503 199603 1 002	III/d	01/04/20	IV/a	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	03/01/17	19	07	PIM IV	2013	SMA	1985	L	ISLAM
5	EKO SUGIONO, S.Sos.	Berau	21/09/83	19830921 201001 1 019	III/d	01/04/22	IV/a	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	10/09/21	13	03	-	-	S.1 Ilmu Sosial	2009	L	ISLAM

Bersambung ...

NO.	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR			NIP	PANGKAT		JABATAN			MASA KERJA		LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN TERAKHIR		JENIS KELAMIN	AGAMA
					GOL	TMT	ESE LON	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	THN	NAMA JURUSAN	THN LULUS		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6	YENNY FURWATI, S.Sos.	Samarinda	09/06/85	19850609 201001 2 009	III/d	01/04/22	IV/a	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	13/08/19	12	03	PIM IV	2018	S.1 Ilmu Sosial	2009	P	ISLAM
7	RINY YUNITA TUMIMOMOR, S.S	Tondano	14/06/78	19780614 200903 2 001	III/d	01/04/22	IV/a	KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM	10/09/21	13	01	PIM IV	2018	S.1 Bahasa Inggris	2003	P	KRISTEN
8	ANDI MASRIADI, SE	Karangan	09/12/83	19831209 200901 1 007	III/c	01/10/22	IV/b	KASUBBAG SUNRAM, KEUANGAN DAN ASET	13/08/19	13	09	-	-	S.1 Ekonomi Manajemen	2005	L	ISLAM
9	DEDI TRIONO, SE	Berau	11/04/84	19840411 200604 1 006	III/a	01/04/19	IV/b	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	04/04/22	14	04	-	-	S.1 Ekonomi Manajemen	2012	L	ISLAM
10	DARYANA	Garut	12/05/76	19760512 200008 1 001	III/a	01/10/21	-	PENGADMINISTRAS I SARANA DAN PRASARANA	-	13	02	-	-	SMA	2002	L	ISLAM

Bersambung ...

NO.	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR			NIP	PANGKAT		JABATAN		MASA KERJA		LATIHAN JABATAN		PENDIDIKAN TERAKHIR		JENIS KELAMIN	AGAMA	
					GOL	TMT	ESE LON	NAMA	TMT	THN	BLN	NAMA	THN	NAMA JURUSAN			THN LULUS
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	SALMON TONAPA	Tana Toraja	25/05/78	19780525 200502 1 004	III/a	01/10/21	-	PENGADMINISTRASI PELAYANAN PUBLIK	-	11	08	-	-	SMK	1996	L	KRISTEN
12	BAMBANG NUGROHO	Purworejo	03/12/75	19751203 200701 1 016	II/d	01/10/21	-	BENDAHARA PENGELUARAN	-	17	01	-	-	STM	1995	L	ISLAM
13	ASRI	Biatan Ulu	10/07/85	19850710 200701 1 003	II/d	01/10/21	-	PENGADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	-	14	09	-	-	SMA	2005	L	ISLAM
14	SABARUDDIN	Karangan	01/07/70	19700701 200006 1 002	II/c	01/04/21	-	PENGADMINISTRASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	-	17	10	-	-	SMA	2005	L	ISLAM

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Biatan

Tabel 1.3.3
DAFTAR TENAGA KONTRAK KECAMATAN BIATAN
PER JANUARI 2023

NO.	NAMA / TEMPAT TANGGAL LAHIR		NOMOR DAN TANGGAL SK		MASA KERJA		PENDIDIKAN TERAKHIR		JENIS KELAMIN	AGAMA	JABATAN
			AWAL	AKHIR	THN	BLN	NAMA JURUSAN	TAHUN LULUS			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	STEPHANUS SUGIARTO	Tering 09/01/1969	814/004/BKD-I/2006 02/01/2006	814.1/36/Set-C.BTN/2021 01/10/2021	15	11	SMA PAKET C	2008	L	ISLAM	Penjaga Malam/Wakar
2	HARIS SUHENDI	Talisayan 26/07/1974	814/3405/BKD-I/2006 02/01/2006	814.1/37/Set-C.BTN/2021 01/10/2021	15	11	SMA IPS	1993	L	ISLAM	Tenaga Tehnis/Tenaga Administrasi
3	ABD. RAZAK	Talisayan 06/03/1978	814/3404/BKD-I/2006 02/01/2006	814.1/38/Set-C.BTN/2021 01/10/2021	15	11	SMU IPS	1998	L	ISLAM	Tenaga Tehnis/Tenaga Administrasi
4	PURDA	Pantai Harapan 13/09/1985	814/3426/BKD-I/2006 02/05/2006	814.1/39/Set-C.BTN/2021 01/10/2021	15	6	SMK PENJUALAN	2004	P	ISLAM	Tenaga Tehnis/Tenaga Administrasi
5	BADARIAH	Biatan Lempake 13/06/1984	814/1892/BKD-I/2007 01/10/2007	814.1/40/Set-C.BTN/2021 01/10/2021	14	2	SMA PAKET C	2007	P	ISLAM	Tenaga Tehnis/Tenaga Administrasi
6	M. SALEH	Bontang 12/06/1986	11 Tahun 2010 01/02/2010	814.1/42/Set-C.BTN/2021 01/10/2021	11	10	SMA IPS	2006	L	ISLAM	Tenaga Tehnis/Tenaga Administrasi
7	YUSRIADI	Karangan 16/10/1982	16 Tahun 2011 01/05/2011	814.1/43/Set-C.BTN/2021 01/10/2021	10	6	SMK OTOMOTIF	2003	L	ISLAM	Sopir Operasional
8	TANTI YOSEVANINGSIH	Berau 26/04/2001	814.1/3889/BKPP-I/2019 01/07/2019	814.1/44/Set-C.BTN/2021 01/10/2021	2	4	SMA IPS	2019	P	ISLAM	Tenaga Kebersihan/Cleaning Service
9	MUHAMMAD DAHLAN MAULANA	Berau 29/04/1999	814.1/47/Set-C.BTN/2021 01/11/2021	814.1/47/Set-C.BTN/2021 01/11/2021	0	2	SMK Noutika Kapal Penangkap Ikan	2018	L	ISLAM	Tenaga Kebersihan/Cleaning Service

Sumber : Subbag. Umum dan Kepegawaian Kecamatan Biatan

1.4 Sumber Daya Manusia

Secara keseluruhan jumlah ASN atau personil pegawai Kantor Camat Biatan sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) saat ini berjumlah 23(Dua puluh tiga) orang termasuk didalamnya PNS Kantor Camat sebanyak 14(empat belas) orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 9(sembilan) orang dengan komposisi, pangkat, jabatan dan golongan serta latar belakang pendidikan formal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4.1
Komposisi Pegawai

No	Kedudukan Dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Camat	1	0	1
2	Sekretariat :			
	2.1 Sekretaris Camat	1	0	1
	2.1.1 Kasubag Sunram, Keu & Aset	1	0	1
	2.1.1.1 Staf Pendukung	1	0	1
	2.1.2 Kasubag Umum Dan Kepegawaian	1	0	1
	2.1.2.1 Staf Pendukung	6	1	7
3	Seksi-Seksi			
	3.1 Kepala Seksi Pemerintahan	1	0	1
	3.1.1 Staf Pendukung	1	1	2
	3.2. Kepala Seksi Tramtib	1	0	1
	3.2.1 Staf POLPP	1	0	1
	3.3 Kepala Seksi Pemberdayaan Masyar	0	1	1
	3.3.1 Staf Pendukung	0	1	1
	3.4 Kepala Kesejahteraan Sosial	1	0	1
	3.4.1 Staf Pendukung	1	0	1
	3.5 Kepala Seksi Pelayanan Umum	0	1	1
	3.5.1 Staf Pendukung	1	0	1
	Jumlah			23

Tabel 1.4.2

Jumlah Pegawai Menurut Status, Jabatan, Pangkat dan Golongan

No	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Jabatan					Jumlah
			Camat (Eselon IIIA)	Sekcam (Eselon IIIB)	Kasi (Eselon IVA)	Kasubag (Eselon IVB)	Staf (Non Eselon)	
1	PNS							
	Pembina Tk I	IV/b	0	0	0	0	0	0
	Pembina	IV/a	1	1	0	0	0	2
	Penata Tk.I	III/d	0	0	5	0	0	5
	Penata	III/c	0	0	0	1	0	1
	Penata Muda Tk. I	III/b	0	0	0	0	0	0
	Penata Muda	III/a	0	0	0	1	2	3
	Pengatur Tk.I	II/d	0	0	0	0	2	2
	Pengatur	II/c	0	0	0	0	1	1
	Peng. Md Tk I	II/b	0	0	0	0	0	0
	Pengatur Mda	II/a	0	0	0	0	0	0
2	Tenaga Kontrak	-	-	-	-	-	9	9
Jumlah			1	1	5	2	14	23

Tabel 1.4.2

Kepegawaian menurut latar belakang Pendidikan Formal

No	Pendidikan	Jabatan					Jumlah
		Camat (Eselon IIIA)	Sekcam (Eselon IIIB)	Kasi (Eselon IVA)	Kasubag (Eselon IVB)	Staf (Non Eselon)	
1	PNS						
	Strata 3	0	0	0	0	0	0
	Strata 2	1	1	0	0	0	2

No	Pendidikan	Jabatan					Jumlah
		Camat (Eselon IIIA)	Sekcam (Eselon IIIB)	Kasi (Eselon IVA)	Kasubag (Eselon IVB)	Staf (Non Eselon)	
	Strata 1	0	0	4	2	0	6
	Diploma 4	0	0	0	0	0	0
	Diploma 3	0	0	0	0	0	0
	Diploma 2	0	0	0	0	0	0
	SLTA	0	0	1	0	5	6
	SLTP	0	0	0	0	0	0
	SD	0	0	0	0	0	0
2	Tenaga Kontak						
	Strata 1	0	0	0	0	0	0
	Diploma 4	0	0	0	0	0	0
	Diploma 3	0	0	0	0	0	0
	Diploma 2	0	0	0	0	0	0
	SLTA	0	0	0	0	9	9
	SLTP	0	0	0	0	0	0
	SD	0	0	0	0	0	0

1.5. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Kecamatan Biatan merupakan lembaga perwakilan pemerintah Kabupaten di tingkatan Kecamatan, yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pemerintah Kabupaten sehingga pembangunan wilayah dapat secara menyeluruh. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Biatan yaitu menerima pelimpahan sebagian wewenang bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Kecamatan Biatan memiliki 23(Dua puluh tiga) orang termasuk didalamnya PNS Kantor Camat sebanyak 14(empat belas) orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 9(sembilan) orang honorer/tenaga kontrak. Komposisi pegawai tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan namun kualitas SDM/tiingkat pendidikan yang terbatas dan belum maksimal dibandingkan dengan beban kerja ada, sehingga membutuhkan keikutsertaan pada pelatihan/diklat maupun pembinaan-pembinaan tentang administrasi kepegawaian agar tepat sasaran sesuai yang diharapkan. demikian juga dalam hal penempatan pegawai diharapkan sesuai dengan bidang keahliannya.

Permasalahan Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Biatan adalah :

- o Terjadinya sengketa kepemilikan tanah dimasyarakat.

- Belum adanya dasar hukum berupa pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- Pagu Anggaran yang terbatas pada program dan kegiatan di luar kegiatan rutin kantor.
- Kualitas SDM/tiingkat pendidikan yang terbatas dibandingkan dengan beban kerja
- Kurangnya kegiatan diklat/pelatihan maupun pembinaan-pembinaan untuk PNS/honorier/Tenaga Kontrak.
- Terbatasnya sarana dan prasarana khususnya peralatan dan perlengkapan kantor.
- Kurangnya koordinasi antar seksi-seksi dan semua pihak yang terkait.

Berbagai isu tersebut, sangat diperlukan didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan di daerah, terutama didalam merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang diinginkan lima tahun kedepan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Bupati dan Wakil Bupati Berau, periode 2021-2026, menetapkan visi dan misi kabupaten berau yang akan menjadi arah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam lima tahun ke depan.

2.1.1. Visi dan Misi

Berikut Visi dan misi Kecamatan Biatan sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Biatan Kabupaten Berau 2021-2026 sebagai berikut :

Visi :

“MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”. Kabupaten Berau merupakan salah satu pintu gerbang pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terletak di sebelah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Utara. Sebagai daerah yang memiliki keindahan wilayah daratan, pesisir pantai, dan lautan dengan sumber daya alam yang beraneka ragam, visi tersebut sangatlah tepat, dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau dilandaskan pada keberhasilan pengembangan agrobisnis dan pariwisata.

Pengembangan agrobisnis merupakan salah satu opsi yang perlu dikembangkan sebagai industri berbasis sumberdaya alam yaitu sektor pertanian. Agrobisnis memiliki potensi untuk meningkatkan penyediaan lapangan kerja yang mampu menyatukan kegiatan berbasis sentra pertanian dengan bisnis. Selanjutnya, pengembangan agrobisnis akan sangat strategis jika dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Pengertian terpadu adalah keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (*backwardandforwardlinkages*), serta pengintegrasian kedua sektor tersebut secara sinergis dan produktif. Sedangkan dengan konsep berkelanjutan, diartikan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya dengan melibatkan kelompok/lembaga masyarakat, serta pemerintah pada semua aspek secara terus-menerus.

Dengan dilakukannya pengembangan agrobisnis, maka secara otomatis akan meningkatkan kontribusi sektor pertanian melalui percepatan ketersediaan lahan dan infrastruktur pertanian unggulan. Agrobisnis dinilai mampu untuk meningkatkan kesejahteraan petani dimana saat ini petani selalu dikonotasikan kurang sejahtera.

Ketika memiliki modalitas dari hasil pembangunan yang ada, lantas fokus pembangunan lima tahun mendatang terwakili oleh tiga kata kunci di dalam visi ini, yaitu :

- o Sejahtera

Suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat Berau yang memiliki rasa aman, damai dan tenteram lahir dan batin dimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia. Kesejahteraan yang akan

diwujudkan adalah suatu kondisi yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Berau.

- o Unggul

Berau yang unggul mengandung pengertian wilayah Kabupaten Berau memiliki sumber-sumber daya lebih tinggi dari wilayah lainnya dengan masyarakat yang aman dan sejahtera. Menciptakan Berau yang Unggul dan Sejahtera merupakan usaha menciptakan keunggulan di sector tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Berau yang unggul dimaksudkan terwujudnya Berau sebagai pusat pengembangan kegiatan perekonomian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber sumber daya keunggulan lokal, pengembangan potensi sosial ekonomi Pariwisata Berau sebagai kawasan Wisata terpadu. Berau yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Berau meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).

- o Berdaya Saing

Daya saing menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing pada umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan komparatif secara berkelanjutan. Daya saing merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi masyarakat.

Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. daya saing juga dapat juga diartikan sebagai kemampuan bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya.

Rumusan visi di atas terbangun dalam satu kesatuan dan saling melengkapi. secara substantif, rangkaian visi tersebut bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur, peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. serta tidak kalah penting, untuk mewujudkan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan serta mewujudkan kohesi sosial di tengah masyarakat Berau.

Misi :

- o untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi sebagai berikut:

- Membangun dan meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
- Mewujudkan masyarakat yang cerdas, sehat, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing tinggi;
- Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel;

Mewujudkan visi dan misi tentu harus terukur, agar pencapaian setiap tahapan dapat dimonitor, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi. Penentuan tujuan dan sasaran menjadi faktor penting untuk kepentingan dimaksud. Secara detail tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Biatan Tahun 2022 - 2026 disajikan pada Tabel berikut :

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Biatan adalah berpedoman kepada Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2022-2026, maka untuk Kecamatan Biatan dirumuskan dalam bentuk Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

- Visi RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 : Mewujudkan Berau Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan.
- Misi IV RPJMD Kabupaten Berau 2021-2026 : Menciptakan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam rangka mewujudkan Visi RPJMD Kabupaten Berau, maka Kecamatan Biatan merumuskan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.1
Tujuan dan Sasaran

Misi	Tujuan	Sasaran
○ Meningkatkan Pelayanan Publik yang cepat dan tepat kepada masyarakat	○ Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan kampung se Kecamatan Biatan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Meningkatkan kualitas pelayanan publik Kecamatan dan Kampung se Kecamatan ○ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

2.1.3. Kebijakan, Strategi, Arah Kebijakan dan Program

Setelah menentukan tujuan dan sasaran maka menentukan strategi dan kebijakan menjadi makin penting oleh karena sebagai acuan didalam menentukan program dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan. Antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan mempunyai hubungan korelatif yang akan sangat terkait dan mengikat, sehingga seolah-olah sebuah paket yang dalam pelaksanaannya tidak boleh melaksanakan satu dengan meninggalkan yang lain. Hal tersebut penting dipahami agar dalam melaksanakan kegiatan tidak hanya sekedar output tercapai, tetapi sampai tercapainya sasaran dan tujuan. Adapun strategi dan kebijakan yang akan ditempuh periode 2021 - 2026 adalah :

- Strategi
 - Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi Aparatur dan fungsi organisasi kecamatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
 - Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan dan Kampung.
 - Memfasilitasi kerjasama Lembaga/Organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat, tertata secara serasi.
- Kebijakan
 - Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Kampung.
 - Pelayanan Prima kepada masyarakat serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang bersih dan nyaman.
 - Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan.

- Program

Program Kecamatan Biatan Tahun 2022 - 2026 dalam rangka pencapaian visi dan Misi Daerah Kabupaten Berau dapat dilihat pada table bawah ini :

Tabel 1.13
Program Kecamatan Biatan Tahun 2022 - 2026
dalam Rangka Pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Berau

VISI (RPJMD)	: Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan sumber Daya Manusia yang handal untuk transformasi ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan		
MISI 4 (RPJMD)	: Meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pelayanan publik yang cepat dan tepat kepada masyarakat	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan kampung se kecamatan Biatan	Memantapkan pemahaman terhadap tupoksi aparatur dan fungsi organisasi kecamatan	Peningkatan kinerja aparatur kecamatan dan kampung
		Menciptakan lingkungan kerja yang sinergis dan dapat bekerja sama secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur kecamatan dan kampung	Pelayanan prima kepada masyarakat serta mengkondisikan lingkungan dan kehidupan yang bersih dan nyaman
		Memfasilitasi kegiatan lembaga pendidikan, olahraga, keagamaan dan perempuan dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan SDM masyarakat	Mengupayakan terjadinya peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan

Sumber : Subbag. Sunram, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrument pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian sasaran yang dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Biatan dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.2.1
Tujuan, Sasaran dan IKU

TUJUAN	SASARAN	IKU
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan dan kampung se Kecamatan Biatan 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan dan kampung se Kecamatan Biatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik di tingkat Kecamatan Nilai LAKIP Perangkat Daerah

Tabel 2.2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SAT.	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pelayanan publik kecamatan dan kampung se Kecamatan Biatan Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan 	<ul style="list-style-type: none"> Nilai survey IKM pelayanan publik di tingkat Kecamatan 	Nilai	93,45	94,00	94,52	96,00	97,00	97,35
	<ul style="list-style-type: none"> Nilai LAKIP Perangkat Daerah 	Nilai	81,00	81,50	82,00	83,50	84,00	85,50

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Kecamatan Biatan Kabupaten Berau Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan rencana strategis Kecamatan Biatan Tahun 2022-2026, dan merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 1(satu) tahun.

Rencana Kerja ini mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Biatan.

o Program dan Kegiatan

Program

Kebijakan terjabar rinci dalam program kerja operasional yang merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Kecamatan Biatan Kabupaten Berau, yaitu:

- o Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- o Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- o Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- o Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan

Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. kegiatan-kegiatan Kecamatan Biatan Kabupaten Berau meliputi :

- o Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- o Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- o Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- o Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- o Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- o Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- o Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- o Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- o Administrasi Umum Perangkat Daerah
- o Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- o Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- o Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- o Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- o Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- o Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
- Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Kecamatan Biatan, dalam Rencana Kerja Kecamatan Biatan Tahun 2022 direalisasikan melalui program dan kegiatan. Program dan kegiatan terlampir pada dokumen Renja Kecamatan Biatan seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3.1

Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan
Prakiraan Maju (Bertambah/Berkurang) Tahun 2024

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Rencana Kerja TA. 2023		Perkiraan Maju Rencana Kerja TA. 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Capaian Kegiatan	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah		82,00 Nilai	26 Dokumen	82,00 Nilai	26 Dokumen	120.700.000
7	1	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			82,00 Nilai	26 Dokumen	82,00 Nilai	26 Dokumen	120.700.000
7	1	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	82,00 Nilai	7 Dokumen	25.000.000	7 Dokumen	25.000.000
7	1	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	82,00 Nilai	12 Dokumen	25.000.000	12 Dokumen	25.000.000
7	1	1	201	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	82,00 Nilai	7 Dokumen	70.700.000	7 Dokumen	70.700.000
7	1	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100,00 Persen	12 Bulan	1.862.220.000	12 Bulan	2.296.480.000
7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	14 Bulan	1.772.000.000	14 Bulan	2.200.000.000
7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi ASN yang dibayar	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	12 Bulan	90.220.000	5 Orang	96.480.000

Bersambung ...

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Rencana Kerja TA. 2023		Perkiraan Maju Rencana Kerja TA. 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Capaian Kegiatan	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100,00 Persen	24 Stel	30.000.000	24 Stel	30.000.000
7	1	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	24 Stel	30.000.000	24 Stel	30.000.000
7	1	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100,00 Persen	100 Persen	246.300.011	100 Persen	271.300.013
7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	7 Jenis	7.500.000	7 Jenis	7.500.000
7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	7 Jenis	25.000.000	7 Jenis	50.000.000
7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	7 Jenis	10.000.000	7 Jenis	10.000.000
7	1	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	75 Kali	97.000.000	75 Kali	97.000.000

Bersambung ...

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Rencana Kerja TA. 2023		Perkiraan Maju Rencana Kerja TA. 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Capaian Kegiatan	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	8000 Lembar	3.000.000	8000 Lembar	3.000.000
7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	50 Kali	103.800.000	50 Kali	103.800.000
7	1	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100,00 Persen			2 Unit	30.000.000
7	1	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan 4 yang tersedia	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100,00 Persen			2 Unit	30.000.000
7	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00 Persen	100 Persen	409.425.739	100 Persen	409.425.741
7	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat bermaterai dan berperangko yang tersedia	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	214 Lembar	1.500.000	214 Lembar	1.500.000
7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	12 Bulan	55.800.000	12 Bulan	55.800.000

Bersambung ...

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Rencana Kerja TA. 2023		Perkiraan Maju Rencana Kerja TA. 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Capaian Kegiatan	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	2 Unit	20.000.000	2 Unit	20.000.000
7	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	9 Orang	332.125.728	9 Orang	332.125.728
7	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100,00 Persen	14 Unit	150.000.000	14 Unit	150.000.000
7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas perorangan dan jabatan, BBM, pelumas, perpanjangan STNK dan KIR	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	12 Unit	120.000.000	12 Unit	120.000.000
7	1	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan, BBM, pelumas, perpanjangan STNK dan KIR	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	2 Unit	30.000.000	2 Unit	30.000.000
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan		100,00 Persen	12 Kali	50.000.000	12 Kali	50.000.000
7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100,00 Persen	12 Kali	50.000.000	12 Kali	50.000.000
7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisai Pencegahan dan Pengawasan Proses yang diadakan	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100,00 Persen	12 Kali	50.000.000	12 Kali	50.000.000

Bersambung ...

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		Rencana Kerja TA. 2023		Perkiraan Maju Rencana Kerja TA. 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Capaian Kegiatan	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan		100,00 Persen	12 Orang	40.000.000	12 Orang	40.000.000
7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			100,00 Persen	12 Orang	40.000.000	12 Orang	40.000.000
7	1	5	201	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Anggota PBB yang dibina	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100,00 Persen	12 Orang	40.000.000	12 Orang	40.000.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan		8 Kampung	8 Kampung	523.009.568	8 Kampung	533.009.568
7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			8 Kampung	8 Kampung	523.009.568	8 Kampung	533.009.568
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah FKKS kampung	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	8 Kampung	8 Kampung	20.000.000	8 Kampung	20.000.000
7	1	3	201	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Tenaga Pendamping Pejuang SIGAP Sejahtera yang tersedia	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	8 Kampung	8 Orang	383.009.568	8 Orang	383.009.568
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK kampung	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	8 Kampung	8 Kampung	120.000.000	8 Kampung	130.000.000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		8 Kampung	8 Kampung	120.250.000	8 Kampung	125.250.000
7	1	6	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			8 Kampung	8 Kampung	120.250.000	8 Kampung	125.250.000
7	1	6	201	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah kampung yang di fasilitasi, dibina, dimonitoring dan dikendalikan dalam pengolaan dana desa	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8 Kampung	8 Kampung	80.250.000	8 Kampung	80.250.000
7	1	6	201	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kampung yang di fasilitasi, dibina, dimonitoring dan dikendalikan dalam pengolaan dana desa	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8 Kampung	2 Kampung	25.000.000	6 Kampung	30.000.000
7	1	6	201	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi/pembinaan terkait ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8 Kampung	8 Kali	15.000.000	8 Kali	15.000.000

Sumber : Subbag. Sunram, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

2.4. Perjanjian Kinerja (PK)

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja (PK) adalah Perjanjian Kinerja Kecamatan Biatan Tahun 2022 yang disusun berdasar pada Rencana Strategis (Renstra) 2021-2026 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/DPAP) Tahun 2022. Perjanjian Kinerja meliputi 5(lima) Program Sasaran Strategis sebagai berikut :

Table 2.4.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kecamatan Biatan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kampung se-Kecamatan Biatan	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik di tingkat Kecamatan	Persen	94,52
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,00

No.	Program	Total Anggaran
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.780.655.313,00
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 604.459.132,00
3	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 69.981.800,00
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 24.834.000,00
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 55.196.700,00
Jumlah		Rp. 4.535.126.945,00

Sumber : Subbag. Sunram, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Secara umum Rencana Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Biatan Tahun 2022 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan potensi yang ada. Keberhasilan suatu proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Kecamatan Biatan telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya dalam meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan dan Kampung se Kecamatan Biatan.

Pengelolaan keuangan kecamatan biatan dalam 3(tiga) tahun terakhir yang dijelaskan dalam bentuk realisasi fisik dan keuangan tahun 2020, 2021 dan 2022 dan prediksinya sampai dengan tahun 2023, alokasi dan realisasi dana pada 3(tiga) tahun terakhir, yang menjadi sandaran penting untuk menentukan focus/prioritas program dan kegiatan tahun 2024

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2022, pelaksanaan kinerja Kecamatan Biatan Kabupaten Berau ditunjang dengan Belanja Operasi dan Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Kecamatan Biatan
Tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022

No	Uraian Anggaran	Besarnya Anggaran DPPA (Rp) Tahun 2020	Besarnya Anggaran DPPA (Rp) Tahun 2021	Besarnya Anggaran DPPA (Rp) Tahun 2022
A	Belanja Daerah	-	-	-
B	Belanja Operasi	3.140.411.145	3.333.230.779	4.033.455.145
1	Belanja Pegawai	2.111.158.000	1.902.215.295	2.277.922.329
2	Belanja Barang dan Jasa	1.029.253.145	1.431.015.484	1.755.532.816
C	Belanja Modal	61.900.000	137.795.800	501.671.800
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.900.000	137.795.800	501.671.800
	Jumlah	3.202.311.145	3.471.026.579	4.535.126.945

Sumber : Subbag. Sunram, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

3.2. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas/kualitas keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, Indikator keluaran (*output*) dan atau hasil (*outcome*) yang diukur berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (*PK*). sesuai ketentuan, Indikator Kinerja SKPD minimal meliputi keluaran (*output*), sehingga pengukuran kinerja Kecamatan Biatan dapat berupa keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja (*PK*) Kecamatan Biatan Tahun 2022.

a) Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.

b) Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran(*output*) kegiatan. Hasil (*outcome*) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja (*PK*) pada tahun anggaran (APBD Kabupaten) 2022, Kecamatan Biatan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 5(lima) program sasaran strategis. Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

1) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} = 100 \%$$

2) Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} = 100 \%$$

kesimpulan hasil pengukuran dibagi menjadi 4(empat) skala nilai peringkat kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

- a) 91 % ≤ 100 % = Sangat Tinggi (ST)
- b) 76 % ≤ 90% = Tinggi (T)
- c) 66 % ≤ 75 % = Sedang (S)
- d) 51% ≤ 65 % = Rendah (R)
- e) ≤ 50 % = Sangat Rendah (SR)

Capaian kinerja Kecamatan Biatan Kabupaten Berau sesuai dengan Perjanjian Kinerja (*PK*) Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,

antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sedangkan evaluasi capaian dana kuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kinerja Kantor Kecamatan Biatan tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Sasaran tersebut antara lain :

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kinerja sasaran ini rata-rata mencapai 100%. dalam usaha mencapai sasaran Kecamatan Biatan menetapkan kebijakan yang dijabarkan dalam 5(lima) program dan 11(sebelas) kegiatan dengan indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti tampak dalam tabel berikut ini :

3.3.1. Membandingkan antara target realisasi Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1
Membandingkan antara Target Realisasi Kinerja Tahun 2022
Kecamatan Biatan

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Capaian Kinerja	Target Kinerja	RP.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.780.655.313	3.462.788.431	91,59
7	1	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26 Dokumen	37.147.600	31.873.009	85,80
7	1	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	24.997.600	22.700.000	90,81

Bersambung ...

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Capaian Kinerja	Target Kinerja	RP.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	1	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	12 Dokumen	12.150.000	9.173.000	75,50
7	1	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	2.293.222.329	2.076.577.195	90,55
7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	2.207.042.329	1.990.397.195	90,18
7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan	86.180.000	86.180.000	100,00
7	1	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	24 Stel	9.000.000	9.000.000	100,00
7	1	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24 Stel	9.000.000	9.000.000	100,00
7	1	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	270.167.600	224.113.880	82,95
7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	4.975.600	4.952.500	99,54
7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Jenis	91.067.600	84.717.300	93,03
7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7 Jenis	2.983.400	1.982.000	66,43
7	1	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75 Kali	89.784.000	67.166.000	74,81
7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8000 Lembar	2.959.000	120.000	4,06
7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali	78.398.000	65.176.080	83,13
7	1	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		461.810.000	449.059.000	97,24
7	1	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100 Persen	461.810.000	449.059.000	97,24
7	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	391.292.384	370.423.847	94,67
7	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	214 Lembar	1.995.600	1.530.000	76,67
7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	49.220.000	35.980.579	73,10
7	1	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Unit	4.900.000	1.000.000	20,41
7	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9 Orang	335.176.784	331.913.268	99,03
7	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14 Unit	318.015.400	301.741.500	94,88
7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Unit	221.015.400	204.741.500	92,64
7	1	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	97.000.000	97.000.000	100,00
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12 Kali	69.981.800	67.545.500	96,52
7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12 Kali	69.981.800	67.545.500	96,52
7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Kali	69.981.800	67.545.500	96,52
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12 Orang	24.834.000	24.834.000	100,00
7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	12 Orang	24.834.000	24.834.000	100,00
7	1	5	201	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12 Orang	24.834.000	24.834.000	100,00
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	8 Kampung	604.459.132	550.455.772	91,07
7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8 Kampung	604.459.132	550.455.772	91,07
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8 Kampung	17.494.500	13.260.000	75,80
7	1	3	201	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	8 Orang	384.502.032	373.426.772	97,12
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 Kampung	202.462.600	163.769.000	80,89
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	8 Kampung	55.196.700	48.334.000	87,57
7	1	6	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8 Kampung	55.196.700	48.334.000	87,57
7	1	6	201	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	8 Kampung	40.200.000	40.200.000	100,00
7	1	6	201	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	8 Kali	14.996.700	8.134.000	54,24
							4.535.126.945	4.153.957.703	91,60

Sumber : Subbag. Sunram, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

3.3.2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1

Membandingkan antara Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
Tahun 2021 s/d. 2022 Kecamatan Biatan

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		TA. 2021		TA. 2022	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Capaian Kegiatan	NILAI	Capaian Kinerja		Capaian Kinerja	
									RP.	%	RP.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	1			KECAMATAN				3.241.512.918	93,39	4.153.957.694	91,60
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah			2.670.676.864	94,28	3.462.788.446	91,59
7	1	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				35.196.700	58,93	31.873.000	85,80
7	1	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	82,00 Nilai	35.196.700	58,93	22.700.000	90,81
7	1	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Nilai LAKIP Perangkat Daerah	82,00 Nilai			9.173.000	75,50
7	1	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				1.905.916.570	98,45	2.076.577.195	90,55
7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	1.836.555.570	98,39	1.990.397.195	90,18
7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi ASN yang dibayar	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	69.361.000	100,00	86.180.000	100,00
7	1	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						9.000.000	100,00
7	1	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen			9.000.000	100,00
7	1	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah				232.901.500	85,50	224.113.892	82,95
7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	4.990.000	100,00	4.952.500	99,54

Bersambung ...

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		TA. 2021		TA. 2022	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Capaian Kegiatan	NILAI	Capaian Kinerja		Capaian Kinerja	
									RP.	%	RP.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	117.504.500	91,72	84.717.300	93,03
7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	16.766.000	94,00	1.982.000	66,43
7	1	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	54.926.000	69,56	67.166.000	74,81
7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	565.000	19,08	120.000	4,06
7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	38.150.000	96,44	65.176.080	83,13
7	1	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						449.059.000	97,24
7	1	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan 4 yang tersedia	Prosentase pelayanan perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	100,00 Persen			449.059.000	97,24
7	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				362.295.994	87,29	370.423.859	94,67
7	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat bermaterai dan berperangko yang tersedia	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	1.600.000	80,13	1.530.000	76,67
7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	55.753.878	85,78	35.980.579	73,10

Bersambung ...

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		TA. 2021		TA. 2022	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Capaian Kegiatan	NILAI	Capaian Kinerja		Capaian Kinerja	
									RP.	%	RP.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	1.000.000	20,20	1.000.000	20,41
7	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	303.942.116	88,59	331.913.268	99,03
7	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				134.366.100	89,76	301.741.500	94,88
7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas perorangan dan jabatan, BBM, pelumas, perpanjangan STNK dan KIR	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	0	0,00	204.741.500	92,64
7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas perorangan dan jabatan, BBM, pelumas, perpanjangan STNK dan KIR	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	134.366.100	96,01		
7	1	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan, BBM, pelumas, perpanjangan STNK dan KIR	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah	100,00 Persen	0	0,00	97.000.000	100,00
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan			51.253.000	93,22		
7	1	2	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				51.253.000	93,22		
7	1	2	201	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sosialisai Pencegahan dan Pengawasan Proses yang diadakan	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100,00 Persen	51.253.000	93,22		
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan			129.492.400	86,33	67.545.500	96,52
7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				129.492.400	86,33	67.545.500	96,52
7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisai Pencegahan dan Pengawasan Proses yang diadakan	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100,00 Persen	129.492.400	86,33	67.545.500	96,52

Bersambung ...

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan		TA. 2021		TA. 2022	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Capaian Kegiatan	NILAI	Capaian Kinerja		Capaian Kinerja	
									RP.	%	RP.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan					24.834.000	100,00
7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						24.834.000	100,00
7	1	5	201	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Anggota PBB yang dibina	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	100,00 Persen			24.834.000	100,00
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan			333.444.254	94,35	550.455.772	91,07
7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				333.444.254	94,35	550.455.772	91,07
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah FKKS kampung	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	8 Kampung			13.260.000	75,80
7	1	3	201	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Tenaga Pendamping Pejuang SIGAP Sejahtera yang tersedia	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	8 Kampung	333.444.254	94,35	373.426.772	97,12
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK kampung	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	8 Kampung			163.769.000	80,89
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			56.646.400	70,94	48.334.000	87,57
7	1	6	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kampung yang di fasilitasi, dibina, dimonitoring dan dikendalikan dalam pengolaan dana desa			56.646.400	70,94	48.334.000	87,57
7	1	6	201	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah kampung yang di fasilitasi, dibina, dimonitoring dan dikendalikan dalam pengolaan dana desa	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8 Kampung	37.220.400	82,87		
7	1	6	201	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kampung yang di fasilitasi, dibina, dimonitoring dan dikendalikan dalam pengolaan dana desa	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8 Kampung	9.976.000	100,00	40.200.000	100,00
7	1	6	201	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi/pembinaan terkait ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penurunan Gangguan Kamtibmas	8 Kampung	9.450.000	37,85	8.134.000	54,24

Sumber : Subbag. Sunram, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

Dari tabel di atas dapat kita lihat perbandingan capaian kinerja dan realisasi keuangan dan fisik tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan dengan nilai dari tahun 2021 sebesar Rp.3.241.512.918,00 (tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) atau (93,39%) dan tahun tahun 2022 sebesar Rp.4.153.957.694,00 (empat milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) atau (91,60%) keadaan ini disebabkan karena persentase penurunan gangguan Kamtibmas pada kegiatan koordinasi/pembinaan ketentraman dan ketertiban umum

3.3.3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.3

Pembandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah
2021 dan 2022 Kecamatan Biatan

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	NILAI	TA. 2021				TA. 2022			
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub				Target Kinerja		Realisasi Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Anggaran	
								%	RP.	%	RP.	%	RP.	%	RP.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	1			KECAMATAN			100		93,39	3.241.512.918	100		91,60	4.153.957.694
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah		100		94,28	2.670.676.864	100		91,59	3.462.788.422
7	1	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	59.724.700	58,93	35.196.700	100	37.147.600,00	85,80	31.873.000
7	1	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	82,00 Nilai	100	59.724.700	58,93	35.196.700	100	24.997.600,00	90,81	22.700.000
7	1	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82,00 Nilai					100	12.150.000,00	75,50	9.173.000
7	1	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100	1.935.905.298	98,45	1.905.916.570	100	2.293.222.329,00	90,55	2.076.577.195
7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100,00 Persen	100	1.866.544.298	98,39	1.836.555.570	100	2.207.042.329,00	90,18	1.990.397.195
7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi ASN yang dibayar	100,00 Persen	100	69.361.000	100,00	69.361.000	100	86.180.000,00	100,00	86.180.000
7	1	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							100	9.000.000,00	100,00	9.000.000
7	1	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	100,00 Persen					100	9.000.000,00	100,00	9.000.000
7	1	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	272.412.500	85,50	232.901.500	100	270.167.600,00	82,95	224.113.880
7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	100,00 Persen	100	4.990.100	100,00	4.990.000	100	4.975.600,00	99,54	4.952.500
7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100,00 Persen	100	128.105.700	91,72	117.504.500	100	91.067.600,00	93,03	84.717.300
7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100,00 Persen	100	17.836.000	94,00	16.766.000	100	2.983.400,00	66,43	1.982.000
7	1	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	100,00 Persen	100	78.960.000	69,56	54.926.000	100	89.784.000,00	74,81	67.166.000
7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor	100,00 Persen	100	2.960.700	19,08	565.000	100	2.959.000,00	4,06	120.000
7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100,00 Persen	100	39.560.000	96,44	38.150.000	100	78.398.000,00	83,13	65.176.080
7	1	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							100	461.810.000,00	97,24	449.059.000
7	1	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan 4 yang tersedia	100,00 Persen					100	461.810.000,00	97,24	449.059.000
7	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	415.025.772	87,29	362.295.994	100	391.292.384,00	94,67	370.423.847
7	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat bermaterai dan berperangko yang tersedia	100,00 Persen	100	1.996.700	80,13	1.600.000	100	1.995.600,00	76,67	1.530.000
7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100,00 Persen	100	65.000.000	85,78	55.753.878	100	49.220.000,00	73,10	35.980.579
7	1	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	100,00 Persen	100	4.950.000	20,20	1.000.000	100	4.900.000,00	20,41	1.000.000
7	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar	100,00 Persen	100	343.079.072	88,59	303.942.116	100	335.176.784,00	99,03	331.913.268
7	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100	149.700.500	89,76	134.366.100	100	318.015.400,00	94,88	301.741.500
7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas perorangan dan jabatan, BBM, pelumas, perpanjangan STNK dan KIR	100,00 Persen	100	9.750.000	0,00	0	100	221.015.400,00	92,64	204.741.500

Bersambung ...

Kode					Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	NILAI	TA. 2021				TA. 2022			
Urusan	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target Kinerja		Realisasi Anggaran		Target Kinerja		Realisasi Anggaran	
								%	RP.	%	RP.	%	RP.	%	RP.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1	1	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas perorangan dan jabatan, BBM, pelumas, perpanjangan STNK dan KIR	100,00 Persen	100	139.950.500	96,01	134.366.100				
7	1	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan, BBM, pelumas, perpanjangan STNK dan KIR	100,00 Persen	100		0,00	0	100	97.000.000,00	100,00	97.000.000
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan		100	54.980.400	93,22	51.253.000				
7	1	2	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100	54.980.400	93,22	51.253.000				
7	1	2	201	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Sosialisai Pencegahan dan Pengawasan Prokes yang diadakan	100,00 Persen	100	54.980.400	93,22	51.253.000				
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan		100	149.996.400	86,33	129.492.400	100	69.981.800,00	96,52	67.545.500
7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			100	149.996.400	86,33	129.492.400	100	69.981.800,00	96,52	67.545.500
7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisai Pencegahan dan Pengawasan Prokes yang diadakan	100,00 Persen	100	149.996.400	86,33	129.492.400	100	69.981.800,00	96,52	67.545.500
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan						100	24.834.000,00	100,00	24.834.000
7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah							100	24.834.000,00	100,00	24.834.000
7	1	5	201	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Anggota PBB yang dibina	100,00 Persen					100	24.834.000,00	100,00	24.834.000
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayana Publik lingkup Kecamatan		100	353.428.112	94,35	333.444.254	100	604.459.132,00	91,07	550.455.772
7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			100	353.428.112	94,35	333.444.254	100	604.459.132,00	91,07	550.455.772
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah FKKS kampung	8 Kampung					100	17.494.500,00	75,80	13.260.000
7	1	3	201	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Tenaga Pendamping Pejuang SIGAP Sejahtera yang tersedia	8 Kampung	100	353.428.112	94,35	333.444.254	100	384.502.032,00	97,12	373.426.772
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK kampung	8 Kampung					100	202.462.600,00	80,89	163.769.000
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		100	79.852.900	70,94	56.646.400	88	55.196.700,00	87,57	8.134.000
7	1	6	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kampung yang di fasilitasi, dibina, dimonitoring dan dikendalikan dalam pengelolaan dana desa		100	79.852.900	70,94	56.646.400	100	55.196.700,00	87,57	8.134.000
7	1	6	201	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah kampung yang di fasilitasi, dibina, dimonitoring dan dikendalikan dalam pengelolaan dana desa	8 Kampung	100	44.911.900	82,87	37.220.400		40.200.000,00	100,00	40.200.000
7	1	6	201	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kampung yang di fasilitasi, dibina, dimonitoring dan dikendalikan dalam pengelolaan dana desa	8 Kampung	100	9.976.000	100,00	9.976.000				
7	1	6	201	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi/pembinaan terkait ketentraman dan ketertiban umum	8 Kampung	100	24.965.000	37,85	9.450.000	100	14.996.700,00	54,24	8.134.000

Sumber : Subbag. Sunram, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

3.3.4. Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja sebagai berikut :

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Biatan untuk tahun anggaran tersebut selesai lebih awal.
- Tersedianya sarana dan prasarana kantor
- Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan dengan aparatur kampung se Kecamatan Biatan
- Terselenggaranya pelayanan admisnistrasi masyarakat
- Adanya kerjasama dan kemauan dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang diberikan

Dalam menghadapi krisis keuangan yang semakin memburuk dampak perang dagang antara amerika serikat dan china menyebabkan inflasi, hilangnya tabungan masyarakat, meningkatnya ketikpastian dan hilangnya kepercayaan terhadap system keuangan, serta menurunnya ekspor bahan baku atau bahan penolong Indonesia ke Amerika Serikat dan China yang mempengaruhi pendapatan dan belanja Negara (APBN) tahun 2022 namun hal tersebut juga berdampak pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) juga mengalami pengurangan diantaranya pendapatan pajak dan dana transfer dari pusat.

Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2022 dapat berjalan dengan baik hal ini terlihat dari realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 91,60% atau Rp.4.153.957.694,00 (empat milyar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) meskipun ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Adapun peningkatan/penurunan kinerja yang dihadapi Kecamatan Biatan Tahun Anggaran 2022 dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :

- Kondisi geografis Kecamatan Biatan yang sangat jauh dari ibu kota Kabupaten (130 km) menyebabkan masyarakat merasa enggan untuk mengurus surat-surat penting ke Kabupaten.
- Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya;
- Sumber daya manusia (SDM) PTT/Tenaga Kontrak memiliki latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan keahliannya;
- Jumlah anggaran belanja modal yang terbatas atau sangat rendah tiap tahunnya khususnya belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

- o Standar pelayanan kepada masyarakat belum dapat terpenuhi secara maksimal disebabkan masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Alternative solusi yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Biatan untuk mengatasi kegagalan dan penurunan kinerja adalah sebagai berikut :

- o Surat atau Undangan yang sifatnya mendesak mengharuskan kehadiran kami ke Kabupaten seharusnya dikirim jauh hari sebelum mendekati waktu pelaksanaan mengingat jarak tempuh Kecamatan Biatan Ke Ibu Kota Kabupaten \pm 3 jam.
- o Mengikutsertakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada diklat-diklat maupun pembinaan-pembinaan;
- o Meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat-diklat maupun pembinaan-pembinaan;
- o Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan.
- o Mengoptimalkan penggunaan perlengkapan meubeleut yang ada dalam menunjang kegiatan/operasional perkantoran atau menambah pagu anggaran belanja khususnya belanja penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.
- o Sebaiknya penetapan/pembentukan panitia pelaksana kegiatan dilakukan lebih cepat dan tepat waktu

3.3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Kurangnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kompetensi dan keahliannya serta sumber daya manusia (SDM) PTT/Tenaga Kontrak memiliki latar belakang pendidikan tidak sesuai dengan keahliannya sehingga terjadi penumpukan pekerjaan di beberapa ASN tertentu, selain itu di setiap seksi-seksi kurang tenaga terampil yang memiliki keterampilan yang diperlukan untuk dapat membantu kepala seksi dalam menjalankan tupoksinya.

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Biatan Kabupaten Berau belum dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Sarana dan prasarana gedung pada Kantor Camat Biatan Kabupaten Berau terdiri dari ruangan Camat, ruangan Sekretaris, ruangan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, ruangan Sub Bagian penyusunan Program, Keuangan dan Aset, ruangan Seksi Pelayanan Umum, ruangan Seksi Kesejahteraan Sosial, ruangan Seksi Ketentraman dan Ketertiban,

3.3.6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang ada di Kecamatan khususnya di Kecamatan Biatan sifatnya adalah rutin sehingga ini yang menjadi penghambat untuk dapat mewujudkan penetapan kinerja. Sebagus apapun penetapan kinerja jika tidak ditunjang dengan

program/kegiatan yang ditunjang dengan terpenuhinya anggaran maka penetapan kinerja tidak akan bisa berjalan, hal ini dikarenakan disetiap seksi-seksi yang ada di Kantor Kecamatan Biatan tidak memiliki Program/kegiatan yang termuat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD Kantor Kecamatan Biatan).

3.3.7. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran Kecamatan Biatan tahun 2022 yang digunakan dan yang telah di gunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dan realisasi anggaran secara keseluruhan dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.4.1
Realisasi Anggaran Tahun 2022
Kecamatan Biatan

Urusan	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Anggaran		Realisasi Anggaran		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					RP.	RP.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	1	1			KECAMATAN					4.153.957.694	91,60			
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase tingkat cakupan penyelenggaraan pelayanan penunjang urusan perangkat daerah				3.462.788.422	91,59	Persentase penurunan gangguan Kamtibmas pada kegiatan koordinasi/pembinaan ketentraman dan ketertiban umum	Melaksanakan evaluasi perencanaan dan penganggaran terkait kegiatan koordinasi/pembinaan ketentraman dan ketertiban umum khususnya perjalanan dinas dalam daerah	
7	1	1	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		82,00 Nilai	19 Dokumen	37.147.600,00	31.873.000	85,80			
7	1	1	201	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	82,00 Nilai	7 Dokumen	24.997.600,00	22.700.000	90,81			
7	1	1	201	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82,00 Nilai	12 Dokumen	12.150.000,00	9.173.000	75,50			
7	1	1	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 Persen	12 Bulan	2.293.222.329,00	2.076.577.195	90,55			
7	1	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100 Persen	14 Bulan	2.207.042.329,00	1.990.397.195	90,18			
7	1	1	202	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi ASN yang dibayar	100 Persen	12 Bulan	86.180.000,00	86.180.000	100,00			
7	1	1	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	24 Stel	9.000.000,00	9.000.000	100,00			
7	1	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	100 Persen	24 Stel	9.000.000,00	9.000.000	100,00			
7	1	1	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	100 Persen	270.167.600,00	224.113.880	82,95			
7	1	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen listrik/penerangan bangunan kantor	100 Persen	7 Jenis	4.975.600,00	4.952.500	99,54			
7	1	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100 Persen	7 Jenis	91.067.600,00	84.717.300	93,03			
7	1	1	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100 Persen	7 Jenis	2.983.400,00	1.982.000	66,43			
7	1	1	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	100 Persen	75 Kali	89.784.000,00	67.166.000	74,81			
7	1	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor	100 Persen	8000 Lembar	2.959.000,00	120.000	4,06			
7	1	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya kebutuhan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	100 Persen	50 Kali	78.398.000,00	65.176.080	83,13			
7	1	1	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 Persen		461.810.000,00	449.059.000	97,24			
7	1	1	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan 4 yang tersedia	100 Persen	100 Persen	461.810.000,00	449.059.000	97,24			

Bersambung ...

Urusan	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Anggaran		Realisasi Anggaran		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					RP.	RP.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	1	1			KECAMATAN					4.153.957.694	91,60			
7	1	1	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	100 Persen	391.292.384,00	370.423.847	94,67			
7	1	1	208	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat bermaterai dan berperangko yang tersedia	100 Persen	214 Lembar	1.995.600,00	1.530.000	76,67			
7	1	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100 Persen	12 Bulan	49.220.000,00	35.980.579	73,10			
7	1	1	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	100 Persen	2 Unit	4.900.000,00	1.000.000	20,41			
7	1	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang dibayar	100 Persen	9 Orang	335.176.784,00	331.913.268	99,03			
7	1	1	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	14 Unit	318.015.400,00	301.741.500	94,88			
7	1	1	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas perorangan dan jabatan, BBM, pelumas, perpanjangan STNK dan KIR	100 Persen	12 Unit	221.015.400,00	204.741.500	92,64			
7	1	1	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan lapangan, BBM, pelumas, perpanjangan STNK dan KIR	100 Persen	2 Unit	97.000.000,00	97.000.000	100,00			
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan		12 Kali	69.981.800,00	67.545.500	96,52			
7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100 Persen	12 Kali	69.981.800,00	67.545.500	96,52			
7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sosialisai Pencegahan dan Pengawasan Proses yang diadakan	100 Persen	12 Kali	69.981.800,00	67.545.500	96,52			
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan		12 Orang	24.834.000,00	24.834.000	100,00			
7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100 Persen	12 Orang	24.834.000,00	24.834.000	100,00			
7	1	5	201	3	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Anggota PBB yang dibina	100 Persen	12 Orang	24.834.000,00	24.834.000	100,00			

Bersambung ...

Urusan	Kode				Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Anggaran		Realisasi Anggaran		Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan					RP.	RP.	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik lingkup Kecamatan		8 Kampung	604.459.132,00	550.455.772	91,07			
7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		8 Kampung	8 Kampung	604.459.132,00	550.455.772	91,07			
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah FKKS kampung	8 Kampung	8 Kampung	17.494.500,00	13.260.000	75,80			
7	1	3	201	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Tenaga Pendamping Pejuang SIGAP Sejahtera yang tersedia	8 Kampung	8 Orang	384.502.032,00	373.426.772	97,12			
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah PKK kampung	8 Kampung	8 Kampung	202.462.600,00	163.769.000	80,89			
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Tingkat cakupan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa		8 Kampung	55.196.700,00	8.134.000	87,57			
7	1	6	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah kampung yang di fasilitasi, dibina, dimonitoring dan dikendalikan dalam pengelolaan dana desa	8 Kampung	8 Kampung	55.196.700,00	8.134.000	87,57			
7	1	6	201	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah kampung yang di fasilitasi, dibina, dimonitoring dan dikendalikan dalam pengelolaan dana desa	8 Kampung	8 Kampung	40.200.000,00	40.200.000	100,00			
7	1	6	201	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi/pembinaan terkait ketenteraman dan ketertiban umum	8 Kampung	8 Kali	14.996.700,00	8.134.000	54,24			

Sumber : Subbag. Sunram, Keuangan dan Aset Kecamatan Biatan

Dari tabel di atas dapat kita lihat antara target dan realisasi fisik dan keuangan pada masing-masing program dan kegiatan pada Kecamatan Biatan pada tahun Anggaran 2022 sebagai berikut Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebesar (91,59%) Rp.3.462.788.422,00 Program Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar (96,52%) Rp.67.545.500,00 Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sebesar (100,00) Rp.24.834.000,00 Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar (91,07%) Rp.550.455.772,00 dan Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sebesar (87,57) Rp.8.134.000,00 secara Keseluruhan Jumlah Realisasi program dan kegiatan fisik dan keuangan Kecamatan Biatan adalah (91,59%) atau Rp.3.462.788.422,00 dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa antara target dan realisasi fisik dan keuangan pada Kecamatan Biatan dapat berjalan dengan baik sesuai target kinerja yang di harapkan.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Biatan merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKj-IP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

B. Tinjauan Khusus

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Biatan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Biatan dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang Analisis penyebab keberhasilan, kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah ditetapkan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

- Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Kampung, tetapi masih kurangnya SDM yang memenuhi kualitas yang diharapkan;
- Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan;
- Perangkat kampung belum difungsikan sesuai tupoksinya sehingga pengadministrasian kegiatan di Kampung belum dikerjakan secara rutin.

Adapun langkah - langkah untuk meminimalkan hambatan - hambatan yang ada adalah sebagai berikut :

- Berupaya meningkatkan kualitas SDM yang ada dengan mengikutsertakan pada diklat - diklat maupun pembinaan - pembinaan
- Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan
- Mengadakan pembinaan administrasi Kampung secara bertahap di 8(delapan) Kampung se Kecamatan Biatan.

C. Saran Tindak Lanjut

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Biatan selama tahun 2022 dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil cukup baik, namun dalam menghadapi krisis keuangan yang semakin

memburuk dampak perang dagang antara amerika serikat dan china menyebabkan inflasi, hilangnya tabungan masyarakat, meningkatnya ketidakpastian dan hilangnya kepercayaan terhadap system keuangan, serta menurunnya ekspor bahan baku atau bahan penolong Indonesia ke Amerika Serikat dan China kondisi tersebut dilakukan lantaran diperlukan realokasi sejumlah kegiatan anggaran untuk penanganan tersebut. demikian juga hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts) belum sesuai target yang diharapkan.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2022 masih terdapat beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2022. Hal ini kita laksanakan berdasarkan hasil evaluasi akhir tahun 2022 dimana masih diperlukan kegiatan tersebut pada waktu yang akan datang. disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kecamatan Biatan tahun 2022 ini disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua.